



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

EVALUASI KESIAPAN KEMENTERIAN KEUANGAN TIMOR-LESTE DALAM TRANSISI KE AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Zejuina Ebi Sonia Ribeiro¹, Nureni Wijayati²

Departamen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Correspondent: cassarayribeiro@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the readiness of the Ministry of Finance of Timor-Leste in transitioning from cash-based accounting to accrual-based accounting as a prerequisite for enhancing fiscal transparency and accountability. Unlike previous studies that mainly examined post-implementation challenges, this research focuses on the pre-implementation stage by applying Kurt Lewin's change theory framework (unfreezing and changing). The research employs a qualitative case study approach through in-depth interviews with key informants selected based on their experience and relevance to accrual accounting policy, complemented by an analysis of official documents. The findings indicate that regulatory readiness remains limited to a macro framework without detailed technical guidelines, human resource capacity has gained political support and international cooperation but remains uneven, while information technology is technically compatible yet system integration and operator competence are still weak. These findings emphasize that the successful transition to accrual accounting in Timor-Leste can only be achieved if technical regulations, human resource capacity, and information technology integration are strengthened simultaneously, consistently, and sustainably.

Keywords: *accrual-based accounting; public sector accounting transition; theory of change; ministry of finance emerging country.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan Kementerian Keuangan Timor-Leste dalam transisi dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual sebagai prasyarat peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengkaji hambatan pasca-implementasi, studi ini menitikberatkan pada tahap pra-implementasi dengan menggunakan kerangka teori perubahan Kurt Lewin (*unfreezing* dan *changing*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang relevan serta analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan regulasi masih terbatas pada kerangka makro tanpa pedoman teknis, kapasitas sumber daya manusia telah memperoleh dukungan politik dan kerja sama internasional tetapi belum merata, sementara teknologi informasi kompatibel namun integrasi sistem dan kompetensi operator masih lemah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan transisi akuntansi akrual di Timor-Leste hanya dapat dicapai apabila regulasi teknis, kapasitas sumber daya manusia dan integrasi teknologi informasi diperkuat secara simultan, konsisten dan berkelanjutan.

Kata Kunci: akuntansi berbasis akrual; transisi akuntansi sektor publik; teori perubahan; kementerian keuangan; negara berkembang.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

PENDAHULUAN

Timor-Leste merupakan salah satu negara termuda di dunia yang berdiri sejak tahun 2002. Sebagai negara berkembang, Timor-Leste masih menghadapi tantangan dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel (PEFA, 2020). Salah satu langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas fiskal adalah reformasi sistem akuntansi, khususnya transisi dari akuntansi basis kas ke akuntansi basis akrual (IPSASB, 2024). Saat ini, Timor-Leste masih menggunakan sistem berbasis kas sesuai ketentuan UU Timor-Leste No. 13/2009 dan UU Timor-Leste No. 2/2022. Sistem ini terbatas dalam menyajikan informasi komprehensif mengenai posisi keuangan pemerintah, terutama terkait aset, kewajiban, dan komitmen jangka panjang, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya transparan dan akuntabel (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2020).

Hasil penilaian *Public Expenditure and Financial Accountability* (PEFA, 2018) menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap di Timor-Leste memperoleh skor C pada indikator *Public Asset Management*, yang menandakan masih adanya kelemahan karena pencatatan aset nonfinansial terfragmentasi dan kurang transparan. Selain itu, laporan keuangan pemerintah masih disusun dengan fokus utama pada realisasi kas, sehingga gambaran mengenai kewajiban jangka Panjang dan utang pemerintah belum tersaji secara komprehensif. Temuan ini sejalan dengan Strategi Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik 2022–2027, yang menegaskan bahwa catatan aset nonfinansial yang lengkap dan terbaru belum tersedia sehingga sistem registrasi aset pemerintah yang terpusat sangat diperlukan (Kementerian Keuangan Timor-Leste, 2022).

Kondisi tersebut menjadi dasar relevansi transisi ke akuntansi berbasis akrual, yang dapat menghasilkan informasi aset dan kewajiban secara lebih komprehensif dan transparan. Hal ini menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah untuk mulai beralih ke akuntansi berbasis akrual agar sejalan dengan praktik internasional (IPSASB, 2024). Atas dasar itu, pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui Diploma Menteri Keuangan Timor-Leste No. 72/2023 dan diperkuat dengan Resolusi Pemerintah Timor-Leste No. 24/2024, yang secara resmi menetapkan perubahan sistem pelaporan keuangan dari basis kas menjadi basis akrual. Implementasi transisi ini direncanakan berlangsung secara bertahap pada periode 2024–2027 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi akuntansi akrual bukanlah hal yang mudah.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Pengalaman beberapa negara berkembang menunjukkan adanya hambatan besar dalam transisi ini. Sri Lanka menghadapi keterbatasan tenaga akuntan dan infrastruktur teknologi (Najimudeen, 2024), Kosovo mengalami kendala dukungan politik dan regulasi (Ismaili et al., 2021), sedangkan Indonesia, meski telah mewajibkan basis akrual sejak 2015, masih menghadapi kesenjangan dalam praktik, terutama di tingkat pemerintah daerah (Yuliati et al., 2019). Dari pengalaman tersebut, terlihat bahwa kesiapan sumber daya manusia, dukungan regulasi, dan teknologi informasi merupakan faktor kunci keberhasilan transisi (Budding, Grossi, & Tagesson, 2015).

Kondisi di Timor-Leste juga berpotensi akan memiliki kemiripan dengan negara-negara tersebut. Perubahan menuju akuntansi akrual bukan sekadar mengganti sistem pencatatan, tetapi juga membutuhkan penyesuaian regulasi, penguatan kapasitas aparatur, dan pengembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, penting untuk menilai kesiapan Kementerian Keuangan Timor-Leste sebelum implementasi dilakukan. Penelitian ini menggunakan Teori Perubahan Kurt Lewin (1951) yang menekankan tiga tahap perubahan yaitu *unfreezing*, *changing* dan *refreezing* (Cameron & Green, 2024). Namun, karena saat ini masih dalam tahap persiapan, penelitian ini difokuskan pada fase *unfreezing* dan *changing*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesiapan Kementerian Keuangan Timor-Leste dalam melakukan transisi dari akuntansi berbasis kas ke berbasis akrual. Penelitian ini penting karena belum banyak kajian yang membahas tahap persiapan sebelum implementasi, sementara sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti permasalahan sistem akrual diterapkan (Najimudeen, 2024; Ismaili et al., 2021; Yuliati et al., 2019). Dengan fokus pada tahap pra-implementasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi transisi yang lebih efektif, terencana dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan utama yaitu sejauh mana Kementerian Keuangan Timor-Leste telah mempersiapkan diri dari sisi regulasi, sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam menghadapi transisi menuju akuntansi berbasis akrual, serta tantangan apa saja yang berpotensi menghambat pada tahap pra-implementasi. Ketiga faktor ini dipilih karena literatur menunjukkan bahwa keberhasilan transisi akuntansi berbasis akrual sangat dipengaruhi oleh kejelasan kerangka regulasi (Ismaili et al., 2021), ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia menentukan sejauh mana akuntansi akrual



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

dapat dijalankan secara efektif (Yuliati et al., 2019) dan dukungan teknologi informasi berperan sebagai instrumen penting untuk memastikan proses pencatatan dan pelaporan berjalan terintegrasi (Najimudeen, 2024).

Penelitian ini memberikan kontribusi pada aspek akademik maupun praktis. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai transisi akuntansi sektor publik dengan menekankan pada tahap pra-implementasi, yang masih jarang diteliti. Sebagian besar studi sebelumnya lebih fokus pada hambatan setelah penerapan akrual (Najimudeen, 2024; Ismaili et al., 2021; Yuliati et al., 2019), sementara penelitian ini memberikan perspektif berbeda dengan menilai kesiapan organisasi sebelum penerapan penuh dilakukan. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan di Timor-Leste, khususnya Kementerian Keuangan, untuk merancang strategi transisi yang lebih terencana melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta modernisasi sistem teknologi informasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya relevan bagi konteks Timor-Leste, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi negara berkembang lain yang sedang menyiapkan reformasi akuntansi pemerintahan menuju basis akrual.

LITERATUR REVIEW

Konsep Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan sistem informasi yang digunakan pemerintah untuk mencatat, mengolah dan menyajikan transaksi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik (Jones & Pendlebury, 2010). Berbeda dengan akuntansi sektor swasta yang berorientasi pada laba, akuntansi sektor publik menekankan pada *stewardship*, efisiensi, serta kepatuhan terhadap anggaran negara. Indonesia sebagai negara terdekat, telah memiliki Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. SAP tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang relevan dan dapat dibandingkan (SAP, 2025). Secara global, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) berfungsi sebagai kerangka internasional untuk meningkatkan kualitas dan keterbandingan laporan keuangan sektor publik, di mana basis akrual dianggap lebih komprehensif dalam menggambarkan kondisi keuangan pemerintah (IPSASB, 2024).

Transisi dari Akuntansi Basis Kas ke Akuntansi Basis Akrual



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Akuntansi basis kas pada dasarnya mencatat pendapatan hanya saat kas diterima dan beban ketika kas dibayarkan. Cara ini memang mudah diterapkan, tetapi memiliki keterbatasan karena tidak menunjukkan kondisi ekonomi secara menyeluruh, misalnya ketika ada piutang atau kewajiban yang belum diselesaikan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2020). Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, digunakan basis akrual yang mengakui pendapatan dan beban pada saat transaksi ekonomi terjadi tanpa menunggu arus kas, sehingga laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan, asset dan kewajiban secara lebih utuh (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2020). Perubahan dari basis kas menuju akrual di sektor publik terjadi karena Basis kas dinilai kurang memadai sebagai landasan pelaporan keuangan pemerintah karena hanya menyoroti arus kas aktual. Selain itu, meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik mendorong perlunya laporan keuangan yang lebih transparan dan informatif. Dorongan dari standar internasional, khususnya International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), juga menjadi faktor penting yang mendorong banyak negara melakukan reformasi keuangan. Lebih jauh lagi, informasi akrual bermanfaat bagi pemerintah untuk mengambil keputusan fiskal jangka panjang, misalnya dalam mengelola aset dan memantau kewajiban utang (Jones & Pendlebury, 2010; IPSASB, 2024).

Pengalaman Negara Lain

Peralihan dari akuntansi berbasis kas menuju basis akrual terbukti menjadi proses yang kompleks di berbagai negara. Sri Lanka, misalnya, menghadapi hambatan serius akibat keterbatasan jumlah akuntan sektor publik dan infrastruktur teknologi yang belum memadai (Najimudeen, 2024). Kesulitan serupa juga dialami oleh Kosovo, yang terhambat oleh lemahnya dukungan politik serta kerangka regulasi yang belum sepenuhnya siap (Ismaili et al., 2021). Indonesia pun menunjukkan dinamika yang hampir sama. Meskipun pemerintah secara resmi mewajibkan penerapan akuntansi akrual sejak 2015, praktik di lapangan masih memperlihatkan kesenjangan implementasi, terutama pada level pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas (Yuliati et al., 2019).

Pengalaman di Italia memperlihatkan dimensi berbeda. Studi Benfante et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan akrual sangat dipengaruhi oleh persepsi manajer akuntansi publik, di mana akrual hanya dianggap bermanfaat apabila tersedia sumber daya manusia yang mampu mengoptimalkan informasi tersebut untuk meningkatkan transparansi dan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

keterbandingan laporan. Di Sri Lanka, perbedaan antarlevel pemerintahan juga terlihat. Pemerintah lokal lebih cepat mengadopsi akrual karena adanya insentif pendanaan dari pusat, sementara pemerintah provinsi lebih lambat akibat kurangnya komunikasi dan keterlibatan pimpinan (Dissanayake et al., 2021). Dari berbagai pengalaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan transisi ke akuntansi akrual sangat bergantung pada dukungan regulasi yang mengatur perubahan, kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan teknologi informasi yang memadai. Ketiga faktor ini merupakan prasyarat agar reformasi akuntansi sektor publik benar-benar menghasilkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Pelajaran tersebut menjadi dasar penting bagi Timor-Leste dalam menilai dan memperkuat kesiapan Kementerian Keuangan menuju penerapan akuntansi berbasis akrual.

Teori Perubahan Kurt Lewin

Transisi akuntansi di sektor publik dapat dipahami melalui kerangka teori perubahan organisasi yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin (1951). Teori ini membagi proses perubahan ke dalam tiga tahap yaitu *unfreezing*, *changing* dan *refreezing* (Cameron & Green, 2024). Tahap *unfreezing* mencakup upaya membangun kesadaran atas keterbatasan sistem lama serta menyiapkan fondasi perubahan melalui regulasi dan infrastruktur teknologi. Tahap *changing* berfokus pada pelaksanaan inisiatif awal, seperti penyelenggaraan pelatihan aparatur, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi baru. Selanjutnya, tahap *refreezing* menekankan pada pembakuan praktik, internalisasi nilai, serta penguatan kebiasaan baru agar perubahan dapat berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan teori perubahan organisasi Lewin dengan fokus pada kesiapan regulasi, sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi di Timor-Leste. Teori Lewin menjelaskan bahwa perubahan organisasi terdiri dari tiga tahap tersebut, namun karena konteks penelitian ini masih berada pada fase persiapan, maka perhatian lebih diberikan pada tahap *unfreezing* dan sebagian pada *changing*. Pada tahap *unfreezing*, penelitian ini menilai bagaimana regulasi, kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi disiapkan agar organisasi siap menerima perubahan. Tahap *changing* dipahami sebagai proses awal transisi menuju sistem akrual, meskipun implementasi penuh belum dijalankan. Sementara itu, tahap *refreezing* belum menjadi fokus utama karena reformasi akrual di Timor-Leste masih berada dalam tahap perencanaan dan belum sampai pada penguatan praktik baru secara berkelanjutan. Dengan kerangka ini, transisi menuju akuntansi akrual dipahami bukan sekadar persoalan teknis



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

pencatatan, melainkan juga sebagai proses perubahan organisasi yang kompleks. Evaluasi kesiapan pada tahap pra-implementasi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan maupun peluang yang ada, sekaligus menjadi masukan strategis bagi Kementerian Keuangan Timor-Leste dalam merancang strategi transisi yang lebih terencana, efektif dan berkelanjutan.

Faktor Kunci Keberhasilan Transisi

Menurut Budding, Grossi, & Tagesson, (2015), faktor kunci keberhasilan transisi akuntansi berbasis akrual mencakup regulasi, sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi. Regulasi menjadi fondasi hukum serta pedoman kebijakan yang memberikan legitimasi dan arah bagi setiap tahapan perubahan, termasuk memastikan konsistensi antara standar internasional dan konteks nasional. SDM memegang peran strategi karena tanpa kapasitas, kompetensi dan komitmen yang memadai, standar akrual sulit dijalankan secara konsisten; oleh karena itu, investasi dalam pelatihan, sosialisasi dan perubahan pola pikir aparatur menjadi hal yang tidak terhindarkan. Sementara itu, teknologi informasi berfungsi tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sarana pengelolaan data, integrasi sistem, serta penyajian laporan keuangan yang lebih akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi antara regulasi yang kuat, SDM yang profesional dan sistem teknologi yang andal akan menjadi penentu utama keberhasilan reformasi akuntansi di sektor publik (Budding, Grossi, & Tagesson, 2015).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kesiapan transisi akuntansi berbasis kas ke akrual pada Kementerian Keuangan Timor-Leste. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara mendalam realitas sosial dan kelembagaan yang melatarbelakangi proses reformasi akuntansi, khususnya dari aspek regulasi, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Menurut Creswell dan Poth (2018), studi kasus kualitatif relevan untuk memahami fenomena kompleks yang terkait dengan kebijakan publik dan perubahan organisasi.

Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kementerian Keuangan Timor-Leste, khususnya pada



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi Nasional sebagai unit yang memegang peran kunci dalam persiapan transisi akrual. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan peran strategis dan langsung dalam proses transisi dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual. Jumlah informan sebanyak enam orang, yaitu Direktur Jenderal Perbendaharaan, pejabat eselon I dengan pengalaman kerja 20 tahun; Direktur Akuntansi Nasional, pejabat eselon II dengan pengalaman kerja 15 tahun; Penasihat Manajemen Umum Perbendaharaan dengan pengalaman kerja 12 tahun; Penasihat Teknis Bidang Teknologi Informasi dengan pengalaman kerja 5 tahun dan dua orang Staf Teknis Akuntansi dengan pengalaman kerja 5 tahun. Kelima informan tersebut dipilih karena memiliki peran langsung dalam persiapan dan pelaksanaan transisi akuntansi berbasis akrual, mulai dari pengambilan kebijakan, penyusunan standar, dukungan manajerial, hingga pelaksanaan teknis. Komposisi ini mencerminkan representasi berbagai tingkat jabatan dan bidang keahlian, sehingga memungkinkan diperolehnya pandangan komprehensif mengenai kesiapan organisasi dalam tiga dimensi utama: regulasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan analisis dokumentasi. Wawancara diarahkan untuk menggali pengalaman, pandangan dan strategi para pemangku kepentingan dalam mempersiapkan transisi ke akuntansi berbasis akrual. Wawancara difokuskan pada tiga tema utama yang berkaitan langsung dengan kesiapan transisi, yaitu regulasi, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali sejauh mana ketiga faktor tersebut telah dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan dalam mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual. Adapun dokumentasi berupa undang-undang, resolusi pemerintah, roadmap reformasi, serta dokumen resmi lainnya digunakan untuk memverifikasi sekaligus melengkapi informasi dari hasil wawancara. Kombinasi kedua teknik ini memungkinkan triangulasi, sehingga temuan penelitian lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan (Creswell & Creswell, 2018).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Data hasil wawancara terlebih dahulu ditranskrip, dibaca berulang, lalu dipilih agar hanya informasi yang relevan dengan focus penelitian yang dipertahankan, sedangkan data



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

dokumentasi ditelaah dan dipilih sesuai konteks penelitian. Selanjutnya, seluruh data dikodekan dan dilompokkannya ke dalam tiga tema utama penelitian yaitu regulasi, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Data yang telah tersusun kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan table ringkas untuk memperlihatkan pola serta hubungan antar tema. Berdasarkan penyajian tersebut, Kesimpulan ditarik dan diverifikasi melalui perbandingan hasil wawancara dengan dokumen resmi guna memastikan konsistensi, validitas dan keterpercayaan temuan penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menjelaskan dinamika awal transisi dari basis kas ke basis akrual secara lebih komprehensif.

Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan hasil, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat serta staf teknis Kementerian Keuangan dibandingkan dengan berbagai dokumen resmi, antara lain undang-undang, resolusi, diploma menteri, dan roadmap transisi, serta dokumen relevan lainnya. Keselarasan antara hasil wawancara dan dokumen dianggap sebagai bukti validitas data. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan, peneliti melakukan penelaahan lebih lanjut dengan mempertimbangkan konteks kebijakan dan perspektif informan. Pendekatan ini memperkuat tingkat keandalan dan keterpercayaan penelitian, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kesiapan Kementerian Keuangan Timor-Leste dalam beralih dari akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data penelitian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman dan Saldaña (2019) yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, hasil wawancara dan dokumentasi difokuskan pada tiga tema utama penelitian, yakni regulasi, sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi (TI). Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel ringkasan untuk memperlihatkan pola serta keterkaitan antar tema. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi guna memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

Penelitian ini menemukan bahwa kesiapan transisi akuntansi berbasis kas menuju



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

akuntansi berbasis akrual di Kementerian Keuangan Timor-Leste dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu regulasi, sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi (TI). Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam menentukan sejauh mana proses transisi dapat berjalan efektif. Secara umum, telah terdapat komitmen dan dukungan kelembagaan yang cukup kuat, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan keterbatasan pada Tingkat implementasi.

Dari sisi SDM, dukungan politik dan kebijakan sudah jelas melalui program beasiswa, sertifikasi profesional (CA, CGAA), serta kerja sama dengan Bank Dunia, Indonesia Aid dan IMF. Pelatihan awal bagi pegawai telah dilakukan dan resistensi terhadap perubahan relatif rendah, menunjukkan adanya modal sosial yang positif. Seperti disampaikan salah satu pejabat teknis: *“Tidak ada resistensi dari para pegawai karena mereka memahami bahwa perubahan menuju sistem akrual akan meningkatkan transparansi”*. Hal ini sejalan dengan *PFM Reform Strategy 2022–2027* yang menempatkan *capacity building* sebagai prioritas utama. Namun, keterbatasan latar belakang akuntansi pada sebagian besar pegawai serta pelatihan yang masih terbatas menjadi hambatan utama.

Berdasarkan hasil analisis wawancara dan telaah dokumen, data yang direduksi menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas SDM telah berjalan, namun pelaksanaannya masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis akrual secara mendalam. Dari perspektif akuntansi, keterbatasan kapasitas SDM berimplikasi langsung pada kualitas pencatatan dan pelaporan berbasis akrual. Tanpa pemahaman memadai mengenai pengakuan aset, depresiasi, maupun kewajiban jangka panjang, pegawai teknis cenderung tetap berorientasi pada pencatatan kas. Hal ini berisiko membuat laporan keuangan parsial, di mana aset pemerintah tidak tercatat secara lengkap dan kewajiban jangka panjang tidak diungkapkan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2020). Dalam konteks IPSAS, penerapan basis akrual menuntut kompetensi teknis yang lebih tinggi, termasuk kemampuan menyusun *Statement of Financial Position* dan *Statement of Financial Performance* (IPSASB, 2024).

Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses peningkatan kapasitas masih berfokus pada pelatihan umum, belum sampai pada penguasaan standar akuntansi akrual secara teknis, sejalan dengan Budding, Grossi, dan Tagesson (2015) yang menyebutkan bahwa keterbatasan pelatihan teknis menjadi kendala utama penerapan akrual di sektor publik. Oleh karena itu, jika *capacity building* hanya terbatas pada level manajerial dan belum menjangkau



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

staf operasional, maka transisi ke akrual berpotensi berjalan formalitas saja. Hal ini konsisten dengan temuan Yuliati et al. (2019) di Indonesia dan Najimudeen (2024) di Sri Lanka, yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas teknis SDM merupakan penghambat utama keberhasilan reformasi akrual.

Hasil penarikan kesimpulan dan verifikasi menunjukkan bahwa temuan tersebut konsisten antara data wawancara dan dokumen resmi, memperkuat keyakinan bahwa aspek SDM telah mengalami perubahan namun belum sepenuhnya mapan. Dalam kerangka teori Lewin, tahap *unfreezing* pada aspek SDM relatif sudah terlewati, ditunjukkan dengan rendahnya resistensi pegawai terhadap perubahan. Pada tahap berikutnya aspek SDM sudah memasuki tahap *changing*. Adanya program pelatihan, beasiswa, serta sertifikasi CA/CGAA menunjukkan bahwa pegawai mulai terlibat dalam proses perubahan, sesuai dengan tahap *changing* yang menekankan aksi nyata dan pelibatan orang. Namun, keterbatasan distribusi pelatihan dan rendahnya kompetensi teknis akrual memperlihatkan bahwa perubahan ini belum mencapai *refreezing*. Dengan kata lain, kompetensi akrual belum menjadi praktik standar yang mapan dalam organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Lewin bahwa tanpa pelebagaan praktik baru secara kolektif, perubahan tidak akan menetap dan berisiko kembali ke pola lama. Dengan demikian, aspek SDM menunjukkan adanya energi perubahan, tetapi belum cukup kuat untuk memastikan transformasi akrual menjadi praktik permanen.

Pada aspek regulasi, kerangka hukum makro melalui UUD Keuangan Negara sudah tersedia, tetapi sifatnya masih umum dan tidak secara eksplisit mengatur transisi ke akuntansi berbasis akrual. Seorang pejabat senior mengingatkan: *“Secara hukum, payung regulasi memang sudah ada, tapi sifatnya masih umum dan belum ada petunjuk pelaksanaan detail”*. Regulasi akrual yang lebih spesifik justru berasal dari Resolusi 24/2024 yang menetapkan adopsi IPSAS berbasis akrual sebagai prioritas utama reformasi, serta Draf SAP 2025 yang tengah disusun sebagai pedoman teknis. Namun, hingga kini pedoman teknis tersebut belum difinalisasi, sementara regulasi lama seperti UU No. 13/2009 dan UU No. 2/2022 masih berbasis kas. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara mandat politik yang kuat dengan pedoman operasional di lapangan.

Berdasarkan hasil reduksi dan analisis data wawancara serta telaah dokumen, ditemukan bahwa peraturan yang ada lebih menekankan pada aspek normatif dan belum dilengkapi panduan teknis yang diperlukan untuk implementasi di tingkat operasional. Temuan ini



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

disajikan secara konsisten dalam berbagai sumber data yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan makro dan kesiapan regulasi teknis. Dari perspektif akuntansi, keterbatasan regulasi teknis berdampak langsung pada konsistensi dan kualitas pencatatan berbasis akrual. Regulasi makro memang telah ada melalui UU No. 13/2009 dan UU No. 2/2022, namun keduanya masih berbasis kas. Tanpa adanya standar akuntansi akrual yang jelas, seperti panduan penerapan akrual, pedoman pengakuan aset tetap, depresiasi, maupun kewajiban jangka panjang, maka pencatatan berisiko dilakukan secara parsial dan tidak seragam antarunit pemerintah. Hal ini berpotensi menurunkan reliabilitas laporan keuangan serta menyulitkan penyusunan *Statement of Financial Position* dan *Statement of Financial Performance* sesuai IPSAS (IPSASB, 2024).

Kondisi ini sejalan dengan temuan Ismaili et al. (2021) di Kosovo dan Najimudeen (2024) di Sri Lanka, yang menunjukkan bahwa keterlambatan penyusunan regulasi teknis menjadi penghambat utama dalam transisi akrual. Bahkan, Budding, Grossi, dan Tagesson (2015) menegaskan bahwa keberhasilan akrual di sektor publik sangat ditentukan oleh kerangka hukum yang mampu menjamin keseragaman praktik pencatatan dan pelaporan. Oleh karena itu, pada tahap persiapan ini, percepatan finalisasi draf SAP 2025 dan pedoman teknis akrual menjadi krusial agar transisi tidak hanya berhenti pada level kebijakan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik akuntansi pemerintah.

Hasil penarikan kesimpulan dan verifikasi menunjukkan bahwa informasi dari wawancara dan dokumen resmi saling memperkuat, menegaskan bahwa kesiapan regulasi masih terbatas pada tahap kebijakan dan belum mencapai kesiapan implementatif. Jika dianalisis menggunakan teori perubahan organisasi dari Lewin (1951), kesiapan regulasi di Timor-Leste masih berada pada tahap *unfreezing*. Kesadaran politik terhadap pentingnya perubahan sudah tampak melalui penerbitan Resolusi No. 24/2024 dan penyusunan draf Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2025, namun belum tersedianya pedoman teknis penerapan akrual menyebabkan organisasi belum dapat bergerak sepenuhnya menuju tahap *changing*. Pada tahap *unfreezing*, pemerintah baru sebatas mengguncang *status quo*, yaitu kondisi lama di mana sistem akuntansi berbasis kas masih dipertahankan karena dianggap nyaman dan stabil. Upaya untuk beralih ke sistem akrual memang telah muncul melalui berbagai kekuatan pendorong (*driving forces*), seperti adanya komitmen politik dan penyusunan rancangan regulasi baru, tetapi kekuatan ini belum cukup untuk mengatasi



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

kekuatan penahan (*resisting forces*), yaitu belum adanya pedoman teknis yang menjadi dasar operasional penerapan akrual. Kondisi ini menimbulkan risiko organisasi kembali ke keadaan homeostasis, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan sistem lama yang dianggap stabil, apabila regulasi teknis tidak segera diselesaikan. Dengan demikian, aspek regulasi menunjukkan bahwa transisi akuntansi di Timor-Leste masih bersifat normatif belum operasional dan belum siap memasuki tahap *changing* maupun *refreezing*.

Pada aspek TI, sistem FreeBalance GRP yang telah digunakan sejak 2012 dinilai cukup kompatibel untuk mendukung akrual, terutama dengan modul pencatatan aset tetap, depresiasi dan integrasi dengan General Ledger. Namun, sebagian besar transaksi akrual masih dicatat manual karena modul akrual belum sepenuhnya tersedia dan integrasi antar-sistem masih lemah. Salah satu staf menyebut: “*Kalau modul FreeBalance tidak di-upgrade untuk akrual, pencatatan akan tetap manual di beberapa bagian*”. Dokumen resmi (*PFM Reform Strategy 2022–2027*) juga menekankan perlunya modernisasi IFMIS, integrasi sistem. Selain itu, keterbatasan kompetensi operator meningkatkan risiko kesalahan pencatatan.

Berdasarkan hasil analisis wawancara dan telaah dokumen, data yang direduksi menunjukkan bahwa sistem TI telah mendukung pencatatan akrual secara konseptual, tetapi belum berfungsi optimal pada tingkat operasional. Penyajian data memperlihatkan bahwa integrasi sistem masih lemah dan kapasitas operator belum memadai untuk memastikan konsistensi pencatatan akrual. Dari perspektif akuntansi, keterbatasan sistem informasi keuangan berimplikasi langsung pada akurasi pencatatan akrual. Modul FreeBalance GRP memang sudah menyediakan fitur pencatatan aset tetap dan depresiasi, namun karena integrasi antarsistem belum optimal dan kompetensi operator masih terbatas, pencatatan akrual berisiko dilakukan secara manual. Kondisi ini sejalan dengan IPSASB (2024) yang menegaskan bahwa sistem informasi akuntansi publik merupakan prasyarat agar basis akrual dapat diimplementasikan secara konsisten. Budding, Grossi, dan Tagesson (2015) juga menekankan bahwa modernisasi teknologi informasi sangat menentukan transparansi dan keterbandingan laporan sektor publik.

Pengalaman negara lain mendukung temuan ini. Ismaili et al. (2021) menunjukkan bahwa lemahnya integrasi sistem di Kosovo menghambat implementasi akrual, sedangkan Najimudeen (2024) menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur TI di Sri Lanka menjadi



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

faktor utama keterlambatan reformasi. Bahkan di Indonesia, Yuliati et al. (2019) menemukan bahwa meskipun regulasi akrual sudah berlaku sejak 2015, ketimpangan kapasitas TI antar daerah membuat penerapannya tidak merata. Dengan demikian, pada tahap persiapan di Timor-Leste, modernisasi FreeBalance GRP, peningkatan integrasi sistem, dan penguatan kapasitas operator menjadi langkah penting agar transisi akrual tidak sekadar formalitas, tetapi menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Hasil penarikan kesimpulan dan verifikasi menunjukkan bahwa temuan dari wawancara konsisten dengan isi dokumen resmi, memperkuat interpretasi bahwa aspek TI telah mengalami perubahan awal namun masih menghadapi hambatan struktural dalam implementasi akrual. Dalam kerangka teori Lewin, aspek TI sudah memasuki tahap *changing*. Penggunaan FreeBalance GRP yang kompatibel dengan akrual menunjukkan arah perubahan, namun keterbatasan integrasi antarsistem dan rendahnya kompetensi operator masih menjadi *resisting forces* yang menahan implementasi penuh. Akibatnya, sebagian pencatatan masih dilakukan secara manual, sehingga akrual belum dapat dipraktikkan secara konsisten. Kondisi ini mencerminkan *quasi-equilibrium*, yaitu situasi ketika organisasi sudah bergerak menuju perubahan tetapi tertahan oleh resistensi struktural. Selama modernisasi sistem dan peningkatan kapasitas operator belum diwujudkan, tahap *refreezing* tidak akan tercapai, dan transisi akrual berisiko berhenti pada tataran formalitas. Dengan demikian, aspek TI menunjukkan bahwa meskipun ada perangkat yang kompatibel, transisi akrual belum dapat terlembaga karena hambatan teknis dan kompetensi pengguna.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan transisi akrual di Timor-Leste masih terbatas pada tahap *unfreezing* dan sebagian awal *changing* dalam kerangka teori perubahan Lewin (1951). Pada aspek regulasi, meskipun terdapat komitmen politik melalui Resolusi 24/2024 dan penyusunan draf SAP 2025, ketiadaan pedoman teknis akrual membuat perubahan masih bersifat normatif dan belum operasional. Pada aspek SDM, adanya program pelatihan, sertifikasi profesional, dan kerja sama internasional menunjukkan energi perubahan sudah dilepaskan, tetapi keterbatasan kompetensi teknis pegawai membuat proses ini belum mencapai *refreezing*. Sementara itu, pada aspek teknologi informasi, penggunaan FreeBalance GRP menandai awal tahap *changing*, namun lemahnya integrasi sistem dan kapasitas operator menghambat pelebagaan praktik akrual. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut memperlihatkan bahwa transisi akrual di Timor-Leste masih rapuh dan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

berisiko kembali ke *status quo* berbasis kas. Untuk memastikan perubahan dapat mencapai tahap *refreezing*, diperlukan percepatan finalisasi regulasi teknis, penguatan kapasitas akuntansi pada seluruh level pegawai, serta modernisasi dan integrasi sistem informasi keuangan.

Tabel 1. Ringkasan Kesiapan Transisi Akuntansi Berbasis Akrua di Timor-Leste

| Faktor Kesiapan | Kondisi Saat Ini | Kelemahan/Kendala | Implikasi/Temuan Utama |
|---------------------------|---|--|--|
| Regulasi | Sudah ada kerangka hukum dasar melalui Resolusi Pemerintah dan diploma Menteri . | Regulasi teknis rinci belum tersedia, termasuk standar akrua yang masih berupa draf dan pedoman operasional. | Regulasi belum kuat untuk diterapkan sepenuhnya; masih pada tahap <i>unfreezing</i> (kesadaran dan persiapan). |
| Sumber Daya Manusia (SDM) | Pemerintah telah mengirim pegawai untuk pelatihan dan sertifikasi profesional (CA/CCGA), serta menjalin kerja sama internasional. | Distribusi pelatihan tidak merata; keterbatasan staf teknis di level operasional; risiko ketergantungan pada pejabat manajerial. | Level teknis masih memerlukan peningkatan kapasitas yang lebih sistematis dan berkelanjutan; berada pada tahap <i>Changing</i> awal. |
| Teknologi Informasi (TI) | FreeBalance GRP sudah menjadi sistem utama keuangan negara sejak 2012 dan kompatibel dengan basis akrua. | Modul akrua belum upgrade; integrasi antarsistem masih terbatas; pengguna masih berorientasi pencatatan kas. | TI berpotensi mendukung akrua, namun perlu Pembaruan sistem dan Pelatihan pengguna agar mampu mencatat transaksi berbasis akrua; berada pada tahap <i>Changing</i> awal. |

Sumber: Hasil wawancara dan analisis dokumen, diolah penulis (2025)

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan transisi dari akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrua di Kementerian Keuangan Timor-Leste masih bersifat parsial. Dari sisi regulasi, kerangka hukum umum yang ada belum mengatur secara spesifik proses transisi menuju akuntansi berbasis akrua. Regulasi yang lebih terarah baru muncul melalui Resolusi Pemerintah No. 24/2024 dan penyusunan Draft SAP 2025, tetapi regulasi teknis belum difinalisasi dan sebagian aturan yang berlaku masih berbasis kas. Kondisi ini menegaskan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

perlunya percepatan penyusunan pedoman operasional serta harmonisasi regulasi agar implementasi akrual dapat berjalan secara konsisten dan menyeluruh.

Dari aspek sumber daya manusia, dukungan politik dan kolaborasi internasional telah menghasilkan berbagai program pelatihan, beasiswa, dan sertifikasi profesional. Namun, keterbatasan latar belakang akuntansi serta distribusi pelatihan yang belum merata masih menjadi kendala signifikan. Dari sisi teknologi informasi, sistem FreeBalance GRP dinilai kompatibel dengan akuntansi akrual, tetapi integrasi antar-sistem belum optimal dan keterampilan pengguna masih terbatas.

Dengan demikian, keberhasilan transisi akuntansi berbasis akrual di Timor-Leste hanya dapat tercapai apabila aspek regulasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi diperkuat secara simultan, konsisten, dan berkelanjutan agar reformasi tidak berhenti pada tahap *unfreezing* atau *changing*, melainkan benar-benar mencapai tahap *refreezing* sesuai teori perubahan organisasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya berfokus pada Kementerian Keuangan, jumlah informan yang relatif terbatas, serta analisis yang menitikberatkan pada tahap *unfreezing* dan *changing* tanpa mengkaji tahap *refreezing*.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Timor-Leste mempercepat penyusunan regulasi teknis dan pedoman operasional yang mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual secara konsisten di seluruh entitas pemerintahan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesional, serta strategi retensi pegawai yang kompeten agar transfer pengetahuan dapat terjaga. Selain itu, modernisasi dan integrasi sistem FreeBalance GRP perlu diprioritaskan, disertai peningkatan kemampuan operator agar teknologi informasi mampu mendukung pelaporan keuangan akrual secara andal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian ke lembaga pemerintahan lainnya dan mencakup tahap *refreezing* untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika perubahan organisasi dalam reformasi akuntansi sektor publik.

REFERENSI

- Budding, T., Grossi, G., & Tagesson, T. (2015). *Public sector accounting and budgeting in Europe: The challenge of harmonization*. Palgrave Macmillan.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Cameron, E., & Green, M. (2024). *Making sense of Change Management, A complete guide to the models, tools and techniques of organization change*.
- Democratic Republic of Timor-Leste, Ministry of Finance. (n.d.). *Strategic plan for adoption of cash-basis & accrual IPSAS*. Dili: Government of Timor-Leste
- Governo da República Democrática de Timor-Leste. (2024, May 22). *Resolução do Governo N. ° 24/2024: Reforma do sistema contabilístico. Jornal da República, Série I, N. ° 21 A, 2*
- Ismaili, A., Ismajli, H., & Vokshi, N. B. (2021). *The importance and challenges of the implementation of ipsas accrual basis to the public sector: The case of kosovo. Accounting, 7(5), 1109–1118. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.028>*
- International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). (2024). *IPSASB-2024- Handbook- of International Public Sector Accounting Pronouncements. Volume1.pdf*.
- Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). *Public Sektor Accounting*.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting : 2nd Edition*. Wiley
- Ministry of Finance. (2024). *Strategy of private-sector financial reporting reform in Democratic Republic of Timor-Leste 2024–2027*. Dili: Government of Timor-Leste
- Ministério das Finanças. (2025). *Conta Geral do Estado: Ano financeiro de 2024*. República Democrática de Timor-Leste. Retrieved from
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ministério das Finanças. (2023, November 29). *Diploma Ministerial N.º 67/2023: Estrutura orgânico-funcional do Centro de Capacitação em Gestão das Finanças Públicas. Jornal da República, Série I, N. ° 45, 2214–2216*
- Najimudeen, A. (2024). *Potential Challenges and Implications of Implementing Accrual Accounting in the Public Sector in Sri Lanka. International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research, 5(2), 439–447*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Republik Indonesia (2025). *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkini berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan revisinya*. Jakarta: KSAP.
- Parlamento Nacional da República Democrática de Timor-Leste. (2009, 21 de outubro). *Lei n. ° 13/2009: Orçamento e gestão financeira. Jornal da República, Série I, N. ° 36, 744–767*
- Parlamento Nacional da República Democrática de Timor-Leste. (2022, 10 de fevereiro). *Lei n. ° 2/2022: Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e gestão financeira pública. Jornal da República, Série I, N. ° 6, 142–169*
- Sylvie Zaitra (Lead Consultant); Eric Vitale (Consultant); Nicolas Drossos (Consultant) with contributions from Arcotia Hatsidimitris (World Bank Global Tax Team Consultant), Luis Almeida (Legal PFM Consultant), Ian Storkey (Debt Consultant), M. da C. and A. Z. W. (World B. P. S. and in collaboration with the M. of F. of T.-L., & The. (2020). *Timor-Leste Public Expenditure and Financial Accountability Assessment 2018. Timor-Leste Public Expenditure and Financial Accountability Assessment 2018. <https://doi.org/10.1596/33896>*
- Salford & Co., & Public Sector Expert Team. (2024, December 10). *Draft SAP 2025: Accrual-*



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- based public sector accounting standards (Exposure Draft)*. Democratic Republic of Timor-Leste, Financial Management Reform Program
- Yuliati, R., Yuliansyah, Y., & Adelina, Y. E. (2019). *The implementation of accrual basis accounting by Indonesia's local governments*. *International Review of Public Administration*, 24(2), 67–80. <https://doi.org/10.1080/12294659.2019.1603954>
- Zhu, M. H. (2020). *Analisis Karakteristik Reformasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Baru Berbasis Sistem Akrual*. 1(2), 54–58.